Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global
Volume. 3, Nomor. 4 November 2026
e-ISSN: 3046-9856; p-ISSN: 3046-9872, Hal. 41-52
DOI: https://doi.org/10.61132/aeppg.v3i4.2665
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/AEPPG

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value For Money*

Cut Arini Zahara
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Penulis korespondensi: cutarinizahara2134@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the financial performance of the Bireuen Regency Regional Government using the Value for Money approach. The research utilizes secondary data obtained from various sources, such as articles, documents, and journals relevant to regional financial management. The research method used is qualitative descriptive by analyzing economic aspects, efficiency, and effectiveness as the main indicators in measuring the financial performance of local governments. The results of the study show that the economic level of regional financial management in 2022, 2023, and 2024 is in the economic category, which indicates that the use of the budget has been carried out economically and in accordance with planning. In terms of efficiency, financial performance in 2022 and 2024 is in the inefficient category, while 2023 is included in the less efficient category. Meanwhile, in terms of effectiveness, the realization of regional revenue in 2022 is in the effective category, while in 2023 and 2024 it is in the very effective category. The findings of the study show that although local governments are able to manage resources economically and achieve revenue targets optimally, there are still problems in the aspect of budget use efficiency. Therefore, efforts are needed to improve the efficiency of financial management so that regional financial performance can be more optimal and support the implementation of an accountable and results-oriented government.*

Keywords: *Budget Efficiency; Financial Effectiveness; Financial Performance; Local Government; Value for Money.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen menggunakan pendekatan *Value for Money*. Penelitian memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti artikel, dokumen, dan jurnal yang relevan dengan pengelolaan keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menganalisis aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas sebagai indikator utama dalam pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ekonomis pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2022, 2023, dan 2024 berada dalam kategori ekonomis, yang mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan secara hemat dan sesuai dengan perencanaan. Pada aspek efisiensi, kinerja keuangan tahun 2022 dan 2024 berada dalam kategori tidak efisien, sedangkan tahun 2023 termasuk kategori kurang efisien. Sementara itu, pada aspek efektivitas, realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 berada dalam kategori efektif, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 berada dalam kategori sangat efektif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah mampu mengelola sumber daya secara ekonomis dan mencapai target pendapatan secara optimal, masih terdapat permasalahan dalam aspek efisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan agar kinerja keuangan daerah dapat lebih optimal serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Kata Kunci: Efektivitas Keuangan; Efisiensi Anggaran; Kinerja Keuangan; Pemerintah Daerah; *Value for Money.*

1. LATAR BELAKANG

Sebagai organisasi sektor publik, misi utama pemerintah adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Praktik pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan utamanya. Kini, kinerja instansi pemerintahan menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik. Masyarakat sering menilai kinerja organisasi sektor publik yang tidak efisien, sebagai bentuk pemborosan, sumber kebocoran

Naskah Masuk: 15 Agustus 2026; Revisi: 19 September 2026; Diterima: 22 Oktober 2026;
Terbit: 01 November 2026

dana, dan selalu merugikan institusi. Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut agar pemerintah dikelola secara profesional dan dilakukannya suatu transparansi serta akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik. Tentunya setiap instansi mendapatkan dana dari APBD untuk mencapai tujuannya. Nantinya, anggaran juga harus mengakomodir pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Keuangan Daerah No.12 tahun 2019, keuangan daerah harus dikelola dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan tentang keadilan, kesopanan, dan rasa hormat yang diterapkan dalam sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran. Daerah yang berhasil melaksanakan otonomi daerah menunjukkan beberapa indikator, seperti kemampuan keuangan daerah dan pemanfaatan PAD. Pengukuran kinerja adalah alat manajemen berorientasi akuntabilitas yang digunakan untuk meningkatkan taraf dalam *decision making* dan menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tindakan pemerintah.

Hasil pengukuran tersebut dapat menunjukkan tingkat implementasi visi dan misi pemerintah saat ini. Pengukuran kinerja sektor publik sangat penting untuk menilai apakah kinerja instansi pemerintah sudah ekonomis, efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo, 2018 dalam (Nurafifah *et al*., 2022) Salah satu cara untuk mengukur kinerja lembaga sektor publik adalah dengan menggunakan pendekatan *value for money*. *Value for Money* adalah sebuah konsep yang mengatur organisasi sektor publik berdasarkan tiga faktor utama: ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Pengadaan dan alokasi sumber daya yang hemat, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti meminimalkan penggunaan sumber daya dan memaksimalkan hasil, dan mencapai tujuan dengan efektif. Pendekatan *value for money* untuk pengukuran kinerja dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan mekanisme manajemen pemerintahannya yang mengandalkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan yang baik.

Masyarakat membutuhkan pelayanan publik yang baik, keseimbangan antara kekuasaan yang mereka miliki dan tanggung jawab (akuntabilitas) yang diberikan kepada mereka yang mereka layani. Birokrat dapat lebih efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan perlindungan masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mencapai dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Tabel 1. Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2022, 2023 dan 2024.

	Pendapatan		Belanja	
Tahun	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2022	1.919.903.373.202,00	1.915.401.151.145,35	2.001.710.922.925,00	1.915.594.279.971,36
2023	1.887.603.782.117,00	1.922.548.533.006,63	1.969.218.264.960,00	1.870.378.393.565,32
2024	2.048.054.656.710,56	2.029.041.837.138,58	2.181.882.538.146,03	2.050.888.233.451,38

Sumber: Data Olahan.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa anggaran pendapatan 2023 lebih kecil dibandingkan dengan realisasi pendapatannya sedangkan anggaran pendapatan 2022 dan 2024 lebih besar dibandingkan dengan realisasi pendapatannya. Pada tahun 2023 pendapatan anggaran sebesar Rp. 1.887.603.782.117,00 namun yang terealisasi sebesar Rp. 1.922.548.533.006,63 hal tersebut disebabkan karena pemerintah mengeluarkan dana yang lebih dari anggaran yang ada terhadap pembangunan aset daerah. Pada tahun 2022 pendapatan anggaran sebesar Rp. 1.919.903.373.202,00 dan yang terealisasikkan sebesar Rp. 1.915.401.151.145,35 dan pada tahun 2024 pendapatan anggaran sebesar Rp. 2.048.054.656.710,56 dan yang terealisasikan sebesar Rp. 2.029.041.837.138,58 hal tersebut disebabkan karena sebagian anggaran tidak terealisasikan oleh pemerintah dan sisa anggaran tersebut disimpan untuk menambah anggaran pendapatan pada tahun selanjutnya. Sedangkan belanja daerah pada tahun 2022, 2023 dan 2024 terdapat kesamaan yang dimana di tahun 2022 anggaran belanja pemerintah lebih besar dibandingkan yang terealisasi begitu juga pada tahun 2023 dan 2024 anggaran belanja pemerintah lebih besar dibandingkan yang terealisaasi. Pada tahun 2022 anggaran belanja pemerintah sebesar Rp. 2.001.710.922.925,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.915.594.279.971,36, tahun 2023 anggaran belanja pemerintah sebesar Rp.1.969.218.264.960,00 yang terealisasi sebesar Rp. 1.870.378.393.565, 32, dan pada tahun 2024 anggaran belanja pemerintah sebesar Rp. 2.181.882.538.146,03 yang terealisasi sebesar Rp. 2.050.888.233.451,38 hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan dana yang berlebihan sehingga terjadi pemborosan keuangan karena adanya pembelian barang dan juga jasa yang melebihi kebutuhan yang ada. Kinerja keuangan merupakan hasil realisasi pendapatan dan belanja yang disusun dan diukur berdasarkan basis akrual.

Kinerja keuangan dapat disimpulkan merupakan gambaran kondisi keuangan sebuah instansi pemerintahan yang dapat diukur dengan cara tertentu yang dapat berupa realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual yang menghasilkan sebuah kesimpulan akan keberhasilan perusahaan atau instansi dalam mengelola keuangan (Harahap, 2020). Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Pendekatan *Value For Money*".

2. KAJIAN TEORITIS

Analisis akuntansi

Analisis menurut (Darminto & Julianti, 2002:52) adalah sebagai berikut: **"**Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan". Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Horngren & Harrison, 2017). Dijelaskan dalam laman investopedia, *account* analysis atau analisis akuntansi adalah suatu proses kritis yang dilakukan terhadap informasi keuangan suatu entitas untuk memahami, mengevaluasi, dan menginterprestasi kondisi keuangan serta kinerja bisnisnya.

Kinerja

Permendagri No. 59 Tahun 2021 (Bab I, Pasal 1:16) menyebutkan pengertian kinerja adalah keluaran atau hasil dari program atau kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut (Bastian, 2006:274), "kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu".

Menurut (Mahsun, 2013) "Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi". Menurut (Moeheriono, 2012), kinerja atau *performance* merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan penilaian atas keberhasilan dalam suatu pencapaian dari target atau tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan. Secara umum, apabila kinerja tiap individu diberi penghargaan, maka memungkinkan kinerja tersebut untuk diberi penghargaan tinggi, sehingga dalam hal ini akan memicu tingginya usaha dari tiap individu tersebut untuk menghasilkan kinerja yang baik. Sebaliknya, jika kinerja tiap individu tidak diberi penghargaan, maka memungkinkan kinerja tersebut diberi penghargaan rendah, dan menyebabkan rendahnya usaha dari tiap individu tersebut dalam menghasilkan kinerja. Menurut (Bastian, 2006:267), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja (performance appraisail) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan (Wikipedia, diakses 27 maret 2017). Dengan demikian, penilaian kinerja adalah merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. Di dalam dunia usaha yang berkompetesi dalam tataran global, maka karyawan memerlukan kinerja tinggi. Pada saat yang bersamaan, karyawan memerlukan umpan balik atas hasil kerja mereka sebagai panduan bagi perilaku mereka di masa yang akan datang (Handoko, 2014). Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu telah disepakati bersama (Sinambela, 2012). Kinerja merupakan hasil kerja dari tingkah laku. Pengertian kinerja ini mengaitkan antara hasil kerja dengan tingkah laku. Sebagai tingkah laku, kinerja merupakan aktivitas manusia yang diarahkan pada pelaksanaan tugas organisasi yang dibebankan kepadanya (Sinambela, 2012).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Sumarjo, 2010). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Syamsi, 1986:199). Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran

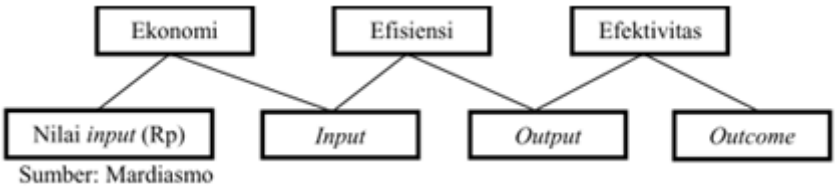
dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

Laporan keuangan pemerintah daerah

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut : laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Value for money

Value For Money menurut (Mardiasmo, 2009:4), merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Secara skematis, *value for money* digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Konsep *Value For Money.*

Berdasarkan definisi dari (Mardiasmo, 2014:4) dan (Bastian, 2016:335), dapat disimpulkan bahwa konsep *value for money* adalah pendekatan dalam pengukuran kinerja sektor publik yang menekankan tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berikut adalah pengertian dari masing-masing elemen tersebut:

a. Ekonomis

   Merujuk pada penggunaan sumber daya yang tersedia secara bijaksana dan efesien. Ini berarti bahwa organisasi sektor publik harus mampu memanfaatkan sumber daya dengan biaya yang seminim mungkin tanpa mengorbankan kualitas atau tujuan akhir yang ingin dicapai.

b. Efisiensi

   Mengacu pada kemampuan organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi terkait dengan upaya untuk menghindari pemborosan dan memaksimalkan *output* atau hasil yang dihasilkan dari setiap unit sumber daya yang digunakan.

c. Efektivitas

Mengukur sejauh mana organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas menekankan pada pencapaian hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif, baik dalam menghadapi tantangan atau memanfaatkan peluang yang ada. Dengan memperhatikan ketiga elemen ini secara bersama- sama, konsep *value for money* membantu organisasi sektor publik dalam mengevaluasi kinerjanya secara komprehensif, memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik diarahkan untuk mencapai hasil yang optimal dengan biaya yang sesuai dan efektivitas yang maksimal. (Mardiasmo, 2009) juga membagi indikator *value for money* menjadi dua, yaitu: alokasi biaya dan Indikator kualitas pelayanan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bireuen berdasarkan konsep Value for Money, yang meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bireuen dengan menggunakan data sekunder berupa APBD dan Laporan Realisasi APBD periode 2022–2024. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri (human instrument) yang bertugas mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi dengan mempelajari buku, jurnal, website, serta dokumen keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui perhitungan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data anggaran dan realisasi agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk menilai kinerja BPKD Kabupaten Bireuen berdasarkan *value for money* yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Indikator *value for money* pada pengukuran kinerja keuangan terdiri dari tiga yaitu ekonomi, efesiensi dan efektivitas. Berikut cara menghitung dari ketiga indikator tersebut:

Pengukuran Ekonomi

$$Ekonomi = \frac{Input}{Input\ value\ (Rp)} x100\%$$

$$Ekonomi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Target\ Anggaran\ Belanja} x100\%$$

Pengukuran Efisiensi

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} x100\%$$

$$Efisiensi = \frac{Realisasi\ Anggaran\ Belanja}{Realisasi\ Pendapatan} x100\%$$

Pengukuran Efektivitas

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} x100\%$$

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan}{Anggaran\ Pendapatan} x100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pendekatan *Value For Money* Kabupaten Bireuen

Rasio Ekonomis

Menurut (Mahsun, 2013:188) perhitungan tingkat ekonomis dapat menggunakan anggaran belanja dengan realisasinya. Oleh karena itu, tingkat ekonomis dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Ekonomis = \frac{Input}{Input\ value\ (Rp)} x100\%$$

Input : Realisasi anggaran belanja

Input value : Target Anggaran belanja

Adapun kriteria ekonomis sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria Ekonomis.

Rasio Ekonomis	Kriteria Ekonomis
100% - keatas	Sangat ekonomis
90% - 100%	Ekonomis
80% - 90%	Cukup ekonomis
60% - 80%	Kurang ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak ekonomis

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996.

Tabel 3. Perhitungan Rasio Ekonomis.

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Anggaran Belanja Daerah	%	Keterangan
2022	1.915.594.279.971,36	2.001.710.922.925,00	95,6%	Ekonomis
2023	1.870.378.393.565,32	1.969.218.264.960,00	94,9%	Ekonomis
2024	2.050.888.233.451,38	2.181.882.538.146,03	93,9%	Ekonomis

Sumber: Laporan Realisasi APBD Pemkab Bireuen yang telah diolah.

Rasio Efisiensi

Menurut (Mahsun, 2013:189) perhitungan tingkat efisiensi dapat mengguna- kan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan yang diasumsikan sebesar total realisasi belanja, kemudian dibandingkan dengan total realisasi pendapatan. Oleh karena itu, tingkat efisiensi dapat diukur menggunakan rumus sebagai berikut.

$$Efisiensi = \frac{Output}{Input} x100\%$$

Output : Realisasi Anggaran Belanja

Input : Realisasi Pendapatan

Tabel 4. Kriteria Efesien.

Rasio Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% - keatas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996.

Tabel 5. Perhitungan Rasio Efesien.

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan	%	Keterangan
2022	1.915.594.279.971,36	1.915.401.151.145,35	100,01%	Tidak Efisien
2023	1.870.378.393.565,32	1.922.548.533.006,63	97,28%	Kurang Efisien
2024	2.050.888.233.451,38	2.029.041.837.138,58	101,07%	Tidak Efisien

Sumber: Laporan Realisasi APBD Pemkab Bireuen yang telah diolah.

Rasio Efektivitas

Menurut (Mahsun, 2013:187-188) tingkat efektivitas adalah tingkat *output* dari organisasi terhadap target-target pendapatan sektor publik, dengan rumus sebagai berikut.

$$Efektivitas = \frac{Outcome}{Output} x100\%$$

Outcome : Realisasi Pendapatan

Output : Anggaran Pendapatan

Adapun merupakan kriteria dari pengukuran efektivitas:

Jika < 100% artinya tidak efektif

Jika >100% artinya efektif

Jika =100% artinya efektif berimbang.

Tabel 6. Kriteria Efektivitas.

Rasio Efektivitas	Kriteria Efektivitas
100% - keatas	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Kepmendagri No. 600.900.327 Tahun 1996.

Tabel 7. Perhitungan Rasio Efesien.

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	%	Keterangan
2022	1.915.401.151.145,35	1.919.903.373.202,00	99,76%	Efektif
2023	1.922.548.533.006,63	1.887.603.782.117,00	101,85%	Sangat Efektif
2024	2.029.041.837.138,58	2.048.054.656.710,56	99,07%	Sangat Efektif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Pemkab Bireuen yang telah diolah.

Pembahasan

Setelah dilakukan perhitungan dengan memakai rumus dari rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas pada laporan APBD Kabupaten Bireuen maka didapatkan hasil seperti tabel berikut:

Tabel 8. Hasil perhitungan mengenai tingkat ekonomis, efisiensi dan efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen tahun 2022, 2023 dan 2024.

Tahun	Rasio Ekonomis		Rasio Efisiensi		Rasio Efektivitas	
	Persen	Kriteria	Persen	Kriteria	Persen	Kriteria
2022	95,6%	Ekonomis	100,01%	Tidak Efisien	99,76%	Efektif
2023	94,9%	Ekonomis	97,28%	Kurang Efesien	101,85%	Sangat Efektif
2024	93,9%	Ekonomis	101,07%	Tidak Efisien	99,07%	Efektif

Sumber: Data Diolah, 2026.

Berdasarkan hasil perhitungan persentase pada tabel 4.7 dalam rasio ekonomis tahun 2022, 2023 dan 2024 memiliki kriteria yang sama yang dimana pada tahun 2022, 2023 dan 2024 termasuk dalam kriteria ekonomis. Pada tahun 2022, 2023 dan 2024 menunjukkan kriteria yang baik karena kinerja yang baik dari pemerintah karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran dengan tepat dalam melakukan operasional dalam kinerja keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan persentase pada tabel 4.7 dalam rasio efisiensi pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 juga berbeda. Pada tahun 2022 dan 2024 termasuk kedalam kriteria tidak efisien sedangkan pada tahun 2023 termasuk ke dalam kriteria kurang efisien.

Berdasarkan hasil persentase pada tabel 4.7 dalam rasio efektifitas dalam kinerja keuangan pemerintah menunjukkan bahwa pada tahun 2022, 2023 dan tahun 2024 memiliki kriteria yang berbeda, yaitu pada tahun 2022 dan 2024 termasuk ke dalam kriteria efektif sedangkan tahun 2023 termasuk kriteria sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berhasil dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat mengetahui yang dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah telah memberikan pelayanan yang tepat sehingga terciptanya efektifitas dalam kinerja pemerintah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen pada tahun 2022-

2024 telah berjalan dengan baik. Jika dilihat dari konsep *Value For Money*. Pemerintah Kabupaten Bireuen pada tahun 2022-2024 telah termasuk kedalam kategori ekonomis yaitu telah memiliki nilai rata- rata 90% keatas. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun masih dalam kategori ekonomis yang berarti pemerintah dapat menekan belanja daerah sehingga tidak adanya pemborosan. Untuk rasio efisien, pada tahun 2022 dan 2024 pemerintah Kabupaten Bireuen dapat dikatakan tidak efisien dengan nilai 100,01% dan 101,07%. Sedangkan pada tahun 2023 dapat dikatakan kurang efesien dengan nilai 97,28%. Agar dapat dikatakan efesien pemerintah Kabupaten Bireuen harus dapat menurunkan realisasi belanja daerah secara signifikan.

Kemudian untuk rasio efektif, di tahun 2022 dan 2024 pemerintah Kabupaten Bireuen dapat di katakan efektif dengan nilai 99,76% dan 99,07%. Sedangkan pada tahun 2023 dapat dikatakan sangat efektif dengan nilai 101,85%. Hal tersebut berarti pemerintah Kabupaten Bireuen telah berhasil meningkatkan realisasi pendapatan daerah secara maksimal. Bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen. Bagi pemerintah Kabupaten Bireuen diharapkan bisa melakukan peningkatan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan menjalankan sesuatu dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal tanpa pemborosan. Bagi masyarakat daerah diharapkan agar ikut berperan dalam memberi dukungan pada pemerintah daerah agar dapat menyejahterakan daerah yang lebih baik lagi kedepannya. Selain itu, masyarakat juga sebagai pelaku ekonomi, sehingga masyarakat juga harus meniliki kesadaran pajak agar dapat meningkatkan perekonomian daerah.

DAFTAR REFERENSI

Amirullah. (2015). Populasi dan Sampel (Pemahaman, Jenis, dan Teknik). *Metode Penelitian Manajemen*.

Aulia, E. N., & Nugraheni, A. P. (2022). *Analisis Value For Money dengan Pendekatan Efektivitas pada Kinerja Keuangan Kota Semarang pada Tahun Anggaran 2017-2021*. *2*(6), 413–420.

Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik:Suatu Pengantar*.

Bastian, I. (2016). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.

Darminto, D. P. dan, & Julianti, R. (2002). *Analisis Laporan Keuangan:Konsep dan Manfaat*.

Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Handoko, T. H. (2014). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE.

Harahap, H. F. (2020). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah*. *4*(1), 34–38. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.87

Horngren, C. T., & Harrison, J. W. T. (2017). *Akuntansi Jilid 1*.

Liando, H. S., Saerang, D. P. E., & Elim, I. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode Value For Money*. *2*(3), 1686–1694.

Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.

Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE.

Mardiasmo. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset.

Matondang, K., Parawanza, A. A., Simanjuntak, J. P., & Tampubolon, Y. (2025). *Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value Of Money Di Kabupaten Dairi Pada Tahun 2023 dan 2024*. *6*(2), 1–10.

Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Raja Grafindo Persada.

Mulyanigtyas. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan Kota Mojokerto dengan Pendekatan Value For Money*. *1*.

Nurafifah, I. P., Haliah, & Nirwana. (2022). *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021)*. *2*(2).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Keuangan Daerah No.12 tahun 2019

Sinambela, L. P. (2012). *Kinerja Pegawai*. Graha Ilmu.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.

Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi S1- Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret,Surakarta.

Syamsi, I. (1986). *Pokok-pokok Kebijaksanaan, Perencanaan, Pemograman, dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*.

Wikipedia. (n.d.). *Definisi Kinerja*. http://www.aidsindonesia.or.id/uploads/20160922152949

Zulkarnain, L. (2021). Analisis Mutu (Input-Proses-Output) Pendidikan di Lembaga Pendidikan Islam MTS Assalam Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. *Manazhim: Jurnal Manajemen Dan Ilmu Pendidikan*, *3*(1), 17–31.